

## MEDIA COVERAGE

### ACARA:

**Seminar hybrid**  
**”Kajian Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN**  
**dalam**  
**Bidang Politik dan Keamanan”**

Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan  
Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.  
Jakarta 8 Februari 2023

Judul	Isu LCS dan Myanmar Perlu Jadi Prioritas
Media	kompas.id/internasional
Terbit	Rabu 08 Feb 2023
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/02/08/isu-laut-china-selatan-dan-myanmar-perlu-jadi-prioritas-keketuaan-indonesia-di-asean">https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/02/08/isu-laut-china-selatan-dan-myanmar-perlu-jadi-prioritas-keketuaan-indonesia-di-asean</a>
Jurnalis/Red	Mahdi Muhammad

### Isu LCS dan Myanmar Perlu Jadi Prioritas

Stabilitas kawasan, yang dipengaruhi dinamika Laut China Selatan dan Myanmar, penentu keberhasilan RI mengejar pertumbuhan di ASEAN.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN pada 2023 ini menghadapi tantangan kompleks.

Minilateralisme di sekitar kawasan, persaingan kekuataglobal, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan akan menjadi tantangan yang harus dihadapi di tengah keinginan mengejar pertumbuhan di kawasan.

Hal itu disampaikan Dewi Fortuna Anwar, Profesor Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), saat berbicara pada seminar nasional bertema Kajian Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Seminar itu diselenggarakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan The Habibie Center.

Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidharto R. Suryodipuro; Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana; dan Wakil Indonesia pada Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum.

## MEDIA COVERAGE

Dewi mengatakan, untuk menciptakan pertumbuhan di kawasan, negara-negara ASEAN di bawah keketuaan Indonesia harus mengupayakan kestabilan, keamanan, dan perdamaian di wilayah itu. Dalam situasi stabil, keamanan yang terjamin, dan dinamika lingkungan yang bisa diprediksi, menurut dia, ekonomi dan perdagangan bisa berjalan serta akan mendorong pertumbuhan di kawasan.

”Untuk membangun kemakmuran, keamanan kawasan, baik itu di dalam lingkungan ASEAN itu sendiri maupun sekelilingnya, harus dibangun. Politik luar negeri tidak cash on delivery, transaksional,” kata Dewi.

### **Tidak mudah**

Menurut Dewi, upaya Indonesia menakhodai ASEAN tahun ini tidak akan mudah. Dewi mengidentifikasi beberapa situasi, baik internal maupun eksternal, yang harus dihadapi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN selama beberapa waktu ke depan, mulai dari sikap China yang agresif, tidak hanya di Taiwan, tetapi juga di Laut China Selatan (LCS) dan kawasan Indo-Pasifik lainnya hingga ke wilayah Pasifik Selatan.

Selain itu, ada pula rivalitas Amerika Serikat dan China di berbagai arena dan kemudian berpindah ke kawasan, termasuk di Selat Taiwan, LCS, hingga Pasifik. Masih ada lagi ketegangan hubungan antara China dengan Jepang, India, dan Australia serta militerisasi LCS.

Dinamika politik dan keamanan di kawasan semakin tidak menentu setelah AS memotori terbentuknya beberapa kerja sama keamanan, yang kerap disebut minilateralisme, untuk membendung sikap dan pengaruh China di kawasan.

Keberadaan Quad dan AUKUS di kawasan adalah cara AS dan sekutu-sekutunya membendung pengaruh China yang makin besar di wilayah ini.

Dewi mengatakan, situasi yang dinamis di halaman depan Indonesia dan ASEAN harus menjadi prioritas bagi keketuaan ASEAN tahun ini. Penyelesaian kode perilaku (code of conduct) di LCS seharusnya menjadi prioritas utama tantangan eksternal ASEAN. Kode perilaku akan menjadi pegangan bagi setiap aktor untuk bersikap dan berhubungan dengan negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan di kawasan dengan ASEAN sebagai tuan rumah.

### **Kredibilitas ASEAN**

Adapun terkait prioritas internal, Dewi berharap agar permasalahan Myanmar bisa segera diselesaikan. Ketidakmampuan ASEAN menyelesaikan situasi di

## MEDIA COVERAGE

Myanmar akan melemahkan kredibilitas ASEAN dan mempersulit keinginan para pemimpin organisasi ini mewujudkan komunitas ASEAN.

Menurut Dewi, ada hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi persoalan di Myanmar, yaitu membuka kemungkinan penjatuhan sanksi terhadap junta militer Myanmar sebagai hukuman atas pelanggaran Piagam ASEAN dan penyusunan peta jalan jangka panjang untuk mengembalikan demokrasi di negara itu.

Yuyun mengatakan, selain penunjukan utusan khusus yang sifatnya tetap untuk membantu Indonesia dan ASEAN dalam berkomunikasi dengan junta militer Myanmar, rencana Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan juga patut didukung.

Komunikasi diharapkan tak terbatas pada komunikasi dengan elite politik Myanmar semata. Pola komunikasi juga tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga bisa dilakukan secara informal guna mendorong terciptanya dialog dan membuka peluang bagi dialog nasional.

Hikmahanto mengatakan, hal penting yang menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia di ASEAN adalah penyelesaian kode perilaku di LCS.

Kode perilaku ini menjadi pegangan bagi negara-negara untuk menghindari insiden antarnegara di LCS hingga memastikan keamanan kapal-kapal yang berlayar di perairan itu.

Keinginan ASEAN memiliki kode perilaku sudah menjadi kesepakatan ASEAN dan China sejak 2002. Baru pada 2018, ASEAN-China bersepakat memulai pembahasan kode perilaku itu. Rencana awal, perundingan akan selesai dalam tiga tahun. Pandemi membuat rencana itu tidak terealisasi.

Menurut Hikmahanto, tantangan dalam pembahasan kode perilaku adalah apakah kode perilaku ini bersifat mengikat secara hukum atau tidak, sampai batas mana (wilayah perairan) kode perilaku berlaku, hingga apakah kode perilaku itu juga mengikat bagi negara-negara di luar ASEAN dan China.

Hikmahanto menyoroti ketidak solidan negara-negara ASEAN untuk menjalani perundingan secara bersama-sama dengan China dalam sengketa klaim atas LCS. Negara-negara ASEAN memilih berunding secara bilateral dengan China.

Empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam, terlibat sengketa klaim atas LCS.



## **MEDIA COVERAGE**

Dalam situasi yang tidak ideal, menurut Hikmahanto, Indonesia harus memastikan bahwa meski ada dinamika di LCS, jangan sampai ada konflik terbuka di antaranegara-negara yang bersengketa. (MHD)

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Indonesia Hadapi Tantangan Guna Lanjutkan Negosiasi Laut Cina Selatan</b>
Media	REPUBLIKA.co.id
Terbit	Rabu 08 Feb 2023 22:10 WIB
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.republika.co.id/berita/rprotb383/indonesia-hadapi-tantangan-guna-lanjutkan-negosiasi-laut-cina-selatan">https://www.republika.co.id/berita/rprotb383/indonesia-hadapi-tantangan-guna-lanjutkan-negosiasi-laut-cina-selatan</a>
Jurnalis/Red	Nidia Zuraya

### **Indonesia Hadapi Tantangan Guna Lanjutkan Negosiasi Laut Cina Selatan**

Rabu 08 Feb 2023 22:10 WIB

Red: Nidia Zuraya

#### **Aktifitas Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dihadapkan tantangan untuk memulai kembali negosiasi pedoman tata perilaku (Code of Conduct/CC) terkait sengketa [Laut Cina Selatan](#) setelah terhenti dua tahun akibat pandemi Covid-19. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (8/2/2023), tidak mudah bagi Indonesia untuk memulai kembali perundingan di tengah suasana yang tidak kondusif.

Pasalnya, Cina, yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berada di bawah kedaulatannya, justru semakin agresif dari waktu ke waktu, salah satunya dengan melakukan reklamasi pulau yang membuat hubungan antara Cina dan beberapa negara anggota [ASEAN](#) semakin memanas.

"Selain itu, geopolitik persaingan antara AS dan sekutunya dengan Cina, serta negara anggota ASEAN yang tidak solid yang kemungkinan disebabkan oleh terafiliasi ke Cina atau AS," kata Hikmahanto.

Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, menurut Hikmahanto, juga bergantung dan sangat diwarnai oleh ketegangan antara AS dan Cina yang kian meningkat. Selain Cina, setidaknya ada lima negara lain yang terlibat klaim atas perairan Laut Cina Selatan, yakni Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, serta Taiwan.

Akibat tindakan Cina yang makin agresif, Filipina pada awal bulan ini memberikan akses lebih luas kepada militer AS di empat pangkalan militer di negaranya. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan upaya menghalangi setiap langkah Cina menentang Taiwan.

Sementara itu, Cina, kata Hikmahanto, tidak mau berkompromi dan mundur dari klaim Sembilan Garis Putus mengingat kebutuhan sumber daya alam di Laut Cina

## MEDIA COVERAGE

Selatan sangat penting bagi eksistensi negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar itu.

ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini bertekad untuk menyelesaikan proses negosiasi CoC Laut Cina Selatan demi menjaga perairan kawasan sebagai tempat yang damai, terbebas dari konflik bersenjata dan nuklir.

Indonesia juga akan menjalankan proses negosiasi yang lebih intensif serta mencari strategi baru sehingga CoC bisa segera dituntaskan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan putaran lanjutan CoC itu akan digelar pada Maret di Jakarta.

"Anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi CoC sesegera mungkin guna melahirkan CoC yang substantif, efektif dan dapat ditindaklanjuti," ujar Retno usai pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Jakarta, pekan lalu.

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Isu Myanmar dan Laut China Selatan Dinilai Jadi Tantangan Keketuaan ASEAN Indonesia</b>
Media	Republika.co.id
Terbit	Rabu 08 Feb 2023 18:06 WIB
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.republika.co.id/berita/rprdjb383/isu-myanmar-dan-laut-china-selatan-dinilai-jadi-tantangan-keketuaan-asean-indonesia">https://www.republika.co.id/berita/rprdjb383/isu-myanmar-dan-laut-china-selatan-dinilai-jadi-tantangan-keketuaan-asean-indonesia</a>
Jurnalis/Red	Kamran Dikarma/ Nidia Zuraya

### **Isu Myanmar dan Laut China Selatan Dinilai Jadi Tantangan Keketuaan ASEAN Indonesia**

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya

#### **Keterlibatan aktif Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satrio Soemantri Brodjonegoro mengatakan, terdapat beberapa isu regional yang menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini. Dua di antara isu tersebut terkait krisis Myanmar dan persengketaan Laut Cina Selatan.

Satrio menjelaskan, mengatasi instabilitas politik di Myanmar membutuhkan pendekatan komprehensif yang turut mempertimbangkan aspek historis dan berbagai konflik berbasis etnis di negara tersebut. Menurutnya, kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada Februari 2021 memperparah keadaan di sana. Aksi perebutan kekuasaan itu pun merepresentasikan kemunduran dari upaya negosiasi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki peran sangat penting dalam menjamin komitmen di antara pihak-pihak terkait dalam krisis Myanmar untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus dan menunjuk utusan khusus untuk Myanmar yang baru,” kata Satrio saat membuka seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar AIPI bersama The Habibie Center (THC), Rabu (8/2/2023).

Kemudian terkait persengketaan di Laut China Selatan, Satrio mengatakan, Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, harus memastikan keberlanjutan negosiasi tentang kode tata perilaku atau Code of Conduct (CoC). “Selain diperlukan komitmen dari para pihak, Indonesia perlu menekankan pentingnya implementasi sentralitas ASEAN secara lebih efektif yang akan berpengaruh besar dalam kemajuan penyusunan CoC,” ujarnya.

## MEDIA COVERAGE

Satryo berpendapat, keterlibatan aktif Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik, terutama dalam merespons dinamika dan rivalitas AS dan Cina serta peran ASEAN di Indo-Pasifik. “Termasuk sensitivitas ASEAN terhadap potensi hadirnya kompetisi antar-negara adidaya di Asia Tenggara,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia perlu menjelaskan karakter inklusif dan konstruksi Indo-Pasifik yang diteruskan oleh ASEAN melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Terkait [isu Myanmar](#) yang disinggung Satryo, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus yang diusulkan Indonesia untuk menangani situasi di Myanmar memperoleh dukungan dari semua anggota ASEAN. Retno menilai, hal itu menunjukkan persatuan ASEAN.

Retno mengungkapkan, ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus menjadi salah satu topik yang dibahas dalam ASEAN Foreign Ministers (AFM) Retreat yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu (4/2/2023). “Seperti yang dimandatkan para pemimpin, sebagai ketua (ASEAN 2023), Indonesia telah mengusulkan dan isu itu telah didiskusikan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus. Dukungan luas diterima dari semua anggota (ASEAN) untuk rencana ini,” kata Retno saat memberi keterangan pers sesuai AFM Retreat.

Dia mengungkapkan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai panduan untuk menangani situasi di Myanmar secara kompak. “(Rencana implementasi) ini memperlihatkan persatuan kuat anggota ASEAN untuk menerapkan Lima Poin Konsensus,” ujar Retno.

Retno mengungkapkan, CoC juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam AFM Retreat. “Komitmen para negara anggota (ASEAN) untuk menyelesaikan negosiasi CoC sesegera mungkin, jelas,” ujar Retno.

Dia menyebut ada kebutuhan untuk menyepakati CoC yang substantif, efektif, dan dapat diterapkan. “Indonesia siap menyelenggarakan lebih banyak putaran negosiasi CoC tahun ini. Yang pertama akan digelar pada Maret,” ujar Retno.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan, niat ketua dan anggota ASEAN tahun ini adalah mengintensifkan negosiasi CoC. “Eksplorasi pendekatan baru akan dilakukan,” ucapnya sesuai Retno menyampaikan keterangan persnya.

Sidharto mengatakan, seperti dalam semua negosiasi, perundingan terkait CoC adalah proses. “Proses itu sendiri mungkin terpenting hasilnya. Jadi proses juga adalah kunci. Dan ini adalah sesuatu yang kami niatkan untuk intensifkan,” ujarnya.

## MEDIA COVERAGE

Dia menjelaskan masalah **Laut Cina Selatan** sudah berlangsung lama. Masalah itu telah eksis sebelum adanya Declaration of Conduct (DoC) dan CoC. “Di antara unsur yang ada di DoC (adalah) semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang bisa mengubah situasi di kawasan (Laut Cina Selatan). Indonesia sendiri, kita tidak menerima segala bentuk upaya yang mengubah situasi di laut,” kata Sidharto.

Untuk menangani perselisihan klaim di Laut China Selatan, ASEAN dan China menandatangani DoC di Kamboja pada November 2002. Deklarasi itu memuat komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.

Kemudian pada 2011 China dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guideline for the Implementation of the DOC. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan CoC atau kode etik di Laut China Selatan. Fungsinya adalah menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Dengan demikian, potensi pecahnya konflik akibat tumpang tindih klaim dapat diredam.

Cina diketahui mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai teritorialnya. Klaim itu ditentang sejumlah negara ASEAN yang wilayahnya turut mencakup perairan tersebut, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Wilayah Laut Natuna Utara Indonesia juga bersinggungan langsung dengan klaim China di Laut Cina Selatan.

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Indonesia akan Gelar ASEAN Indo-Pasific Forum</b>
Media	Republika.co.id
Terbit	Rabu 08 Feb 2023 21:27 WIB
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.republika.co.id/berita/rprmt0383/indonesia-akan-gelar-asean-indopasific-forum">https://www.republika.co.id/berita/rprmt0383/indonesia-akan-gelar-asean-indopasific-forum</a>
Jurnalis/Red	Kamran Dikarma/ Nidia Zuraya



### **Forum tersebut digelar sebagai tindak lanjut ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro mengatakan, sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan menggelar ASEAN Indo-Pacific Forum. Forum tersebut digelar sebagai tindak lanjut ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

“Untuk AOIP, Indonesia akan menggelar ASEAN Indo-Pacific Forum untuk tindak lanjut AOIP, yang terdiri dari empat kegiatan utama yaitu Creative Economic Forum, Youth Dialogue or Digital Development for SDG’s, ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum, ASEAN Business and Investment Summit,” kata Sidharto saat memberikan pidato dalam seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar Akademi

## MEDIA COVERAGE

Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama The Habibie Center (THC), Rabu (8/2/2023).

Dia mengungkapkan, implementasi **AOIP** merupakan salah satu pilar yang tercakup dalam tema keketuaan Indonesia di ASEAN, yakni “ASEAN Matters”. “AOIP tidak hanya menjadi narasi dan prinsip yang layak diikuti bersama, tapi didorong untuk menjadi kerja sama konkret untuk membawa negara-negara besar dalam interaksi di antara mereka di Asia Tenggara, yang positif dan konstruktif. ASEAN tidak ingin menjadi ajang persaingan mereka, karena kita bersahabat dengan semua,” ucapnya.

Menurut Sidharto, para mitra ASEAN, termasuk negara-negara besar, memiliki kepentingan untuk berperan konstruktif di kawasan. “Jadi semuanya menjadi pemangku kepentingan bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,” ujarnya.

AOIP diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada Juni 2019. Inisiatif awal konsep AOIP berasal dari proposal Indonesia. AOIP merupakan penegasan posisi ASEAN dalam perannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mencakup Asia Pasifik dan Samudra Hindia.

AOIP mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka serta inklusif di bidang-bidang prioritas ASEAN. Mereka antara lain maritim, ekonomi, konektivitas, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Kemenlu: Indonesia Jadi Ketua Saat ASEAN di Persimpangan Jalan</b>
Media	Republika.co.id
Terbit	Rabu 08 Feb 2023 21:37 WIB
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.republika.co.id/berita/rprnay383/kemenlu-indonesia-jadi-ketua-saat-asean-di-persimpangan-jalan">https://www.republika.co.id/berita/rprnay383/kemenlu-indonesia-jadi-ketua-saat-asean-di-persimpangan-jalan</a>
Jurnalis/Red	Kamran Dikarma/ Nidia Zuraya

### **Kemenlu: Indonesia Jadi Ketua Saat ASEAN di Persimpangan Jalan**



*Logo keketuaan Indonesia di ASEAN. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro mengatakan, ASEAN selalu berada di persimpangan jalan setiap Indonesia memegang keketuaan. Kendati demikian, dia mengklaim, Indonesia selalu menawarkan jalan keluar.*

*Foto: Asean*

#### **Indonesia selalu menawarkan jalan keluar bagi ASEAN.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro mengatakan, ASEAN selalu berada di persimpangan jalan setiap Indonesia memegang keketuaan. Kendati demikian, dia mengklaim, Indonesia selalu menawarkan jalan keluar.

“Dalam tiga kali Indonesia memimpin ASEAN sebelumnya, ASEAN selalu berada di persimpangan jalan, dan Indonesia selalu menawarkan jalan keluar. Sesuatu yang bersifat strategis,” kata Sidharto saat memberikan pidato dalam seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama The Habibie Center, Rabu (8/2/2023).

Dia mencontohkan ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 1976. “Pada 1976, waktu **KTT ASEAN** pertama kali di Bali, ASEAN, sebagai upaya menanggapi perkembangan di kawasan dan global, yang ditandai ketidakpastian hubungan antar negara besar, negara adikuasa, serta situasi pasca Perang Vietnam, ASEAN

## MEDIA COVERAGE

telah menghasilkan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Sepakat membentuk perdagangan bebas, sepakat membentuk sekretariat ASEAN, dan beberapa kesepakatan lain,” ucapnya.

Pada 2003, saat kedua kalinya Indonesia menjadi ketua, ASEAN memutuskan memperkuat persatuan dan sepakat membentuk ASEAN Community dengan tiga pilarnya. Pilar tersebut adalah politik-keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi. “Selanjutnya KTT ASEAN yang ketiga tahun 2011 (di Bali) telah meningkatkan sentralitas ASEAN, seperti perluasan East Asia Summit serta pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership yang telah berlaku tahun lalu,” kata Sidharto.

Menurut dia, saat Indonesia kembali menjadi ketua tahun ini, ASEAN tengah menghadapi berbagai tantangan besar dan mendasar. Seperti krisis keuangan, energi, pangan, perubahan iklim, disrupti rantai pasok global, dan rivalitas geopolitik. “Persaingan antar-negara besar ini yang telah mengubah tatanan dunia dan kawasan. Perang Ukraina dan krisis di Eropa, rivalitas AS-China, ketegangan di Selat Taiwan, di Semenanjung Korea, di Laut China Selatan. Semua adalah manifestasi dari persaingan tersebut,” ucap Sidharto.

Sidharto mengungkapkan, sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan menggelar “ASEAN Indo-Pacific Forum”. Forum tersebut digelar sebagai tindak lanjut ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Dia menjelaskan implementasi AOIP merupakan salah satu pilar yang tercakup dalam tema keketuaan Indonesia di ASEAN, yakni “ASEAN Matters”.

“AOIP tidak hanya menjadi narasi dan prinsip yang layak diikuti bersama, tapi didorong untuk menjadi kerja sama konkret untuk membawa negara-negara besar dalam interaksi di antara mereka di Asia Tenggara, yang positif dan konstruktif. ASEAN tidak ingin menjadi ajang persaingan mereka, karena kita bersahabat dengan semua,” kata Sidharto.

Menurut Sidharto, para mitra ASEAN, termasuk negara-negara besar, memiliki kepentingan untuk berperan konstruktif di kawasan. “Jadi semuanya menjadi pemangku kepentingan bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,” ujarnya.

AOIP diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada Juni 2019. Inisiatif awal konsep AOIP berasal dari proposal Indonesia. AOIP merupakan penegasan posisi ASEAN dalam perannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mencakup Asia Pasifik dan Samudra Hindia.

AOIP mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka serta inklusif di bidang-bidang prioritas ASEAN. Mereka antara lain maritim, ekonomi, konektivitas, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## MEDIA COVERAGE

Judul	Kabar Baik dari Pakar, Indonesia Makin Diperhitungkan Kalau Sukses Bereskan Masalah Myanmar dan Laut China Selatan
Media	Warta Ekonomi
Terbit	Rabu, 08 Februari 2023, 21:21 WIB
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://wartaekonomi.co.id/read479028/kabar-baik-dari-pakar-indonesia-makin-diperhitungkan-kalau-sukses-bereskan-masalah-myanmar-dan-laut-china-selatan">https://wartaekonomi.co.id/read479028/kabar-baik-dari-pakar-indonesia-makin-diperhitungkan-kalau-sukses-bereskan-masalah-myanmar-dan-laut-china-selatan</a>
Jurnalis/Editor	Muhammad Syahranto

### **Kabar Baik dari Pakar, Indonesia Makin Diperhitungkan Kalau Sukses Bereskan Masalah Myanmar dan Laut China Selatan**

#### **Warta Ekonomi, Jakarta -**

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) [Satryo Soemantri Brodjonegoro](#) mengatakan, terdapat beberapa isu regional yang menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai ketua [ASEAN](#) tahun ini. Dua di antara isu tersebut terkait krisis Myanmar dan persengketaan Laut China Selatan.

Satryo menjelaskan, mengatasi instabilitas politik di Myanmar membutuhkan pendekatan komprehensif yang turut mempertimbangkan aspek historis dan berbagai konflik berbasis etnis di negara tersebut.

#### **Baca Juga: [Laut China Selatan Jadi Tantangan Maritim Indonesia, Orang Ini Kasih Penjelasan](#)**

Menurutnya, kudeta yang dilakukan [militer Myanmar](#) pada Februari 2021 memperparah keadaan di sana. Aksi perebutan kekuasaan itu pun merepresentasikan kemunduran dari upaya negosiasi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki peran sangat penting dalam menjamin komitmen di antara pihak-pihak terkait dalam krisis [Myanmar](#) untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus dan menunjuk utusan khusus untuk Myanmar yang baru,” kata Satryo saat membuka seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar AIPI bersama The Habibie Center (THC), Rabu (8/2/2023).

Kemudian terkait persengketaan di [Laut China Selatan](#), Satryo mengatakan, Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, harus memastikan keberlanjutan negosiasi tentang kode tata perilaku atau *Code of Conduct* (CoC).

“Selain diperlukan komitmen dari para pihak, Indonesia perlu menekankan pentingnya implementasi sentralitas ASEAN secara lebih efektif yang akan berpengaruh besar dalam kemajuan penyusunan CoC,” ujarnya.

## MEDIA COVERAGE

Satrio berpendapat, keterlibatan aktif Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik, terutama dalam merespons dinamika dan rivalitas AS dan China serta peran ASEAN di Indo-Pasifik.

“Termasuk sensitivitas ASEAN terhadap potensi hadirnya kompetisi antar-negara adidaya di Asia Tenggara,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia perlu menjelaskan karakter inklusif dan konstruksi Indo-Pasifik yang diteruskan oleh ASEAN melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Terkait isu Myanmar yang disinggung Satrio, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus yang diusulkan Indonesia untuk menangani situasi di Myanmar memperoleh dukungan dari semua anggota ASEAN. Retno menilai, hal itu menunjukkan persatuan ASEAN.

Retno mengungkapkan, ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of the *Five-Point Consensus* menjadi salah satu topik yang dibahas dalam ASEAN Foreign Ministers (AFM) Retreat yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu (4/2/2023).

“Seperti yang dimandatkan para pemimpin, sebagai ketua (ASEAN 2023), Indonesia telah mengusulkan dan isu itu telah didiskusikan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus. Dukungan luas diterima dari semua anggota (ASEAN) untuk rencana ini,” kata Retno saat memberi keterangan pers sesuai AFM Retreat.

Dia mengungkapkan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai panduan untuk menangani situasi di Myanmar secara kompak.

“(Rencana implementasi) ini memperlihatkan persatuan kuat anggota ASEAN untuk menerapkan Lima Poin Konsensus,” ujar Retno.

Retno mengungkapkan, CoC juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam AFM Retreat.

“Komitmen para negara anggota (ASEAN) untuk menyelesaikan negosiasi CoC sesegera mungkin, jelas,” ujar Retno.

Dia menyebut ada kebutuhan untuk menyepakati CoC yang substantif, efektif, dan dapat diterapkan.

“Indonesia siap menyelenggarakan lebih banyak putaran negosiasi CoC tahun ini. Yang pertama akan digelar pada Maret,” ujar Retno.

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.

**Editor:** Muhammad Syahrianto

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan</b>
Media	G-News
Terbit	Kamis, 09 Februari 2023   08:10:02
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.g-news.id/kajian-prioritas-kepemimpinan-indonesia-di-asean-dalam-bidang-politik-dan-keamanan/">https://www.g-news.id/kajian-prioritas-kepemimpinan-indonesia-di-asean-dalam-bidang-politik-dan-keamanan/</a>
Jurnalis	n.n

### **Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan**



Jakarta – Rabu, 8 Februari 2023 pukul 13.00–16.00 WIB, Komisi Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan The Habibie Center menyelenggarakan seminar nasional bertajuk, “**Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan**” bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

## MEDIA COVERAGE

Seminar ini dibuka dengan sambutan dari **Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro** selaku

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Pidato kunci disampaikan oleh **H.E. Sidharto R. Suryodipuro** selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pidato penutup disampaikan oleh Bapak **Mohammad Hasan Ansori, Ph.D.** selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center.

Narasumber dalam seminar ini adalah **Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A.** (Anggota Komisi Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, dan Profesor Riset BRIN), **H.E. Yuyun Wahyuningrum M.A.** (Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)), **Prof.**

**Hikmahanto**

**Juwana, Ph.D.** (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), dan dimoderatori oleh **Prof. Mayling Oey-Gardiner** (Ketua Komisi Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menerima palu tanda estafet kepemimpinan di ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41, yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 13 November 2022. Dengan penyerahan ini, Indonesia secara resmi menggantikan posisi Kamboja sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2023.

Keketuaan Indonesia mengusung tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.*” memuat aspirasi Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global untuk menyongsong potensi ekonomi Indonesia selepas pandemi. Selain itu, komponen “*ASEAN Matters*” menggarisbawahi keinginan Indonesia untuk menegaskan relevansi ASEAN di dalam dan luar kawasan. Relevansi ASEAN kerap dipertanyakan dalam menghadapi berbagai isu intra dan ekstra-regional.

Penyelesaian kasus Myanmar merupakan salah satu isu internal yang kerap menghadirkan perdebatan intens terhadap peran ASEAN dalam mencapai stabilitas kawasan. Indonesia berulang kali menegaskan pendiriannya dalam mengimplementasikan *Five-Point Consensus* dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar. Secara bersamaan, Indonesia turut mendorong dialog mengenai isu Rohingya.

Peran ASEAN

pun turut diuji dalam menanggapi isu Laut Cina Selatan. Indonesia secara konsisten mempromosikan dialog di bawah mekanisme ASEAN.

## MEDIA COVERAGE

Meskipun negosiasi *Code of Conduct* (CoC) masih bergulir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi telah menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengintensifkan dialog mengenai CoC. Upaya tersebut merepresentasikan tradisi Indonesia dalam mengedepankan dialog dan mengupayakan posisi yang kohesif di antara negara-negara ASEAN.

Dinamika dan interaksi dari kedua isu di atas akan mendefinisikan kemampuan ASEAN dalam mempertahankan relevansinya dalam merespons isu-isu politik keamanan di bawah keketuaan Indonesia.

Melalui seminar ini, Komisi Ilmu Sosial – AIPI dan The Habibie Center bertujuan untuk mensosialisasikan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dan untuk memberikan masukan kebijakan pemerintah, mengingat aspirasi komunitas ASEAN adalah *people-oriented* dan *people at the centre*. Seminar ini juga akan mengkaji dan mengeksplorasi prioritas dan tantangan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam bidang politik dan keamanan, serta mengkaji peran aktif Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam memberikan berbagai alternatif solusi untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan regional.

Seminar ini merupakan seri pertama dari rangkaian seminar yang akan dilaksanakan selama tiga kali pada **2023**. Rangkaian seminar ini akan menghadirkan praktisi dan akademisi yang berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan dan mempertemukan berbagai perspektif mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.(RedG)

## MEDIA COVERAGE

Judul	Indonesia Optimistis Lanjutkan Negosiasi Laut China Selatan, Pakar Nilai Tak Semudah Itu
Media	JPPN.COM
Terbit	Kamis, 9 Feb 2023
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/indonesia-optimistis-lanjutkan-negosiasi-laut-china-selatan-pakar-nilai-tak-semudah-itu/ar-AA17fVnV?ocid=EMMX">https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/indonesia-optimistis-lanjutkan-negosiasi-laut-china-selatan-pakar-nilai-tak-semudah-itu/ar-AA17fVnV?ocid=EMMX</a>
Jurnalis	Redaksi JPNN.com

### Indonesia Optimistis Lanjutkan Negosiasi Laut China Selatan, Pakar Nilai Tak Semudah Itu

Kisah dari JPNN.COM • Kemarin 22.43

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dihadapkan tantangan untuk memulai kembali negosiasi pedoman tata perilaku (Code of Conduct/CC) terkait sengketa Laut China Selatan setelah terhenti dua tahun akibat pandemi COVID-19.



Indonesia Optimistis Lanjutkan Negosiasi Laut China Selatan, Pakar Nilai Tak Semudah Itu© JPNN.COM

## MEDIA COVERAGE

Menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu, tidak mudah bagi Indonesia untuk memulai kembali perundingan di tengah suasana yang tidak kondusif.

Pasalnya, China, yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan berada di bawah kedaulatannya, justru semakin agresif dari waktu ke waktu, salah satunya dengan melakukan reklamasi pulau yang membuat hubungan antara China dan beberapa negara anggota ASEAN semakin memanas.

“Selain itu, geopolitik persaingan antara AS dan sekutunya dengan China, serta negara anggota ASEAN yang tidak solid yang kemungkinan disebabkan oleh terafiliasi ke China atau AS,” kata Hikmahanto.

Penyelesaian sengketa Laut China Selatan, menurut Hikmahanto, juga bergantung dan sangat diwarnai oleh ketegangan antara AS dan China yang kian meningkat.

Selain China, setidaknya ada lima negara lain yang terlibat klaim atas perairan Laut China Selatan, yakni Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, serta Taiwan.

Akibat tindakan China yang makin agresif, Filipina pada awal bulan ini memberikan akses lebih luas kepada militer AS di empat pangkalan militer di negaranya.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan upaya menghalangi setiap langkah China menentang Taiwan.

Sementara itu, China, kata Hikmahanto, tidak mau berkompromi dan mundur dari klaim Sembilan Garis Putus mengingat kebutuhan sumber daya alam di Laut China Selatan sangat penting bagi eksistensi negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar itu.

ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini bertekad untuk menyelesaikan proses negosiasi CoC Laut China Selata demi menjaga perairan kawasan sebagai tempat yang damai, terbebas dari konflik bersenjata dan nuklir.

Indonesia juga akan menjalankan proses negosiasi yang lebih intensif serta mencari strategi baru sehingga CoC bisa segera dituntaskan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan putaran lanjutan CoC itu akan digelar pada Maret di Jakarta.

“Anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi CoC sesegera mungkin guna melahirkan CoC yang substantif, efektif dan dapat ditindaklanjuti,” ujar Retno usai pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Jakarta, pekan lalu. **(ant/dil/jpnn)**

## MEDIA COVERAGE

Judul	Ada ekspektasi tinggi dari keketuaan Indonesia dalam ASEAN
Media	ANTARA NEWS
Terbit	Kamis, 9 Februari 2023
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.24hour.id/ada-ekspektasi-tinggi-dari-keketuaan-indonesia-dalam-asean/">https://www.24hour.id/ada-ekspektasi-tinggi-dari-keketuaan-indonesia-dalam-asean/</a>
Jurnalis	Shofi Ayudiana / Editor: Jafar M Sidik

### Ada ekspektasi tinggi dari keketuaan Indonesia dalam ASEAN



### Ada Ekspektasi Tinggi Dari Keketuaan Indonesia Dalam Asean

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar menilai ada ekspektasi tinggi dari komunitas internasional atas peran Indonesia yang kini menjabat ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Pasalnya, peran Indonesia dalam ASEAN selama ini, baik sebagai ketua maupun anggota, selalu diiringi inovasi yang mengukuhkan posisi ASEAN sebagai organisasi regional. Contohnya, *Treaty of Amity and Cooperation* yang didasari oleh Bali Concord I, yang disahkan di Indonesia pada 1976.

Inisiatif untuk membentuk Komunitas ASEAN yang bersandar pada Bali Concord II juga disahkan ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 2003.

Sedangkan sebagai anggota, Indonesia kerap mempromosikan berbagai prakarsa yang signifikan terhadap evolusi organisasi, seperti Piagam ASEAN dan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (AOIP).

## MEDIA COVERAGE

“Tantangan Indonesia, adanya ekspektasi tinggi atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Pertama, karena rekam jejak Indonesia yang selalu menciptakan *milestone* penting ketika menjadi ketua ASEAN,” kata Dewi dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu.

“Lalu kepiawaian diplomasi Indonesia dan keberhasilan G20 yang berlangsung di tengah tensi yang tinggi,” kata dia.

Dewi menyebut ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Isu regional yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia adalah penyelesaian krisis Myanmar dan perbedaan pandangan di antara anggota ASEAN.

Dari sisi eksternal, Indonesia harus berupaya melanjutkan negosiasi panduan tata perilaku (*Code of Conduct/CoC*) sengketa Laut China Selatan di tengah China yang makin agresif.

Selain itu, kinerja Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik, terutama dalam merespons dinamika dan rivalitas Amerika Serikat dan China serta peran ASEAN di Indo-Pasifik.

Namun penyelesaian krisis Myanmar menjadi sorotan utama dalam pemaparan Dewi. Dia menekankan tidak ada kemajuan dari Konsensus Lima Poin yang disepakati dua tahun lalu. Situasi di Myanmar justru makin memburuk.

Dewi mengatakan ASEAN harus mulai menunjuk utusan khusus tetap yang bersedia mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk membantu Myanmar.

Tugas utusan khusus untuk Myanmar saat ini memang diemban secara bergantian oleh menteri luar negeri dari negara yang menjabat ketua ASEAN.

Namun dua utusan khusus keketuaan ASEAN sebelumnya, yakni Brunei Darussalam dan Kamboja, belum berhasil membujuk pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlang untuk mengizinkan bertemu penasihat negara Aung San Suu Kyi dan membuka dialog bersama pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Dewi, utusan khusus tetap bisa membantu dalam menguraikan dan memahami masalah lebih dalam sehingga bisa dipercaya semua pihak.

Selain menetapkan utusan khusus permanen untuk Myanmar, ASEAN juga dinilai perlu meyakinkan mitra wicara, seperti China dan Rusia yang menjadi pendukung junta, agar mendukung ASEAN dalam mengatasi isu Myanmar.

Pewarta: Shofi Ayudiana

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2023

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Isu Myanmar dan Laut China Selatan Dinilai Jadi Tantangan Keketuaan ASEAN Indonesia</b>
Media	Medcom.id
Terbit	Rabu, 8 Februari 2023 20:45
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asean/5b2rpW2b-bantu-krisis-myanmar-asean-harus-tunjuk-utusan-tetap">https://www.medcom.id/internasional/asean/5b2rpW2b-bantu-krisis-myanmar-asean-harus-tunjuk-utusan-tetap</a>
Jurnalis	Marcheilla Ariesta

### **Bantu Krisis Myanmar, ASEAN Harus Tunjuk Utusan Tetap**

**Jakarta:** Utusan khusus [ASEAN](#) untuk membantu [Myanmar](#) selalu berganti setiap tahunnya. Penyebabnya, utusan khusus ditunjuk oleh negara yang saat itu menjadi ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar menyarankan agar ASEAN menunjuk utusan khusus tetap untuk membantu Myanmar mengatasi krisis di negara itu. Menurutnya, rotasi setiap tahun adalah masalah yang menyebabkan penunjukan utusan khusus ASEAN tidak membuahkan hasil.

"Perlu ditunjuk utusan khusus yang dedicated dengan durasi kerja yang lebih lama," kata Dewi Fortuna, dalam kegiatan 'Kajian Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan' yang digelar Habibie Center, Rabu, 8 Februari 2023.

Indonesia tahun ini bertanggung jawab menunjuk utusan khusus ASEAN untuk Myanmar karena menjadi ketua. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memimpin kantor utusan khusus yang dibuat di bawah kepemimpinan RI.

Menurut Dewi Fortuna, utusan khusus ada baiknya dipermanenkan. Hal ini, menurut dia, dapat membantu menguraikan dan memahami masalah lebih dalam lagi.

Sehingga, kata dia, nantinya bisa mendapatkan kepercayaan semua pihak. "Namun, ia harus siap bolak-balik ke Myanmar dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan (dari junta)," sambungnya.

**Baca juga:** [ASEAN Terus Dorong Pihak Bertikai di Myanmar untuk Berani Berdialog](#)

Ia juga menambahkan, selain ASEAN, negara mitra wicaranya seperti India, Tiongkok, serta Rusia harus mendukung dalam mengatasi isu Myanmar ini.



## **MEDIA COVERAGE**

Terlebih, Tiongkok dan Rusia memiliki 'hubungan khusus' dengan Myanmar dan pendukung junta militer.

Dalam kegiatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro menegaskan, Indonesia akan berupaya menggandeng negara-negara yang berkepentingan untuk mendukung penerapan Lima Poin Konsensus (5PC) dalam mengatasi krisis politik di Myanmar.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun [Google News Medcom.id](https://www.google.com/news/medcom.id)

(FJR)

## MEDIA COVERAGE

Judul	<b>Isu Myanmar dan Laut China Selatan Dinilai Jadi Tantangan Keketuaan ASEAN Indonesia</b>
Media	Harian Aceh Indonesia
Terbit	Kamis, 9 Februari 2023
Tone	Neutral
Halaman/Link	<a href="https://www.harianaceh.co.id/2023/02/08/isu-myanmar-dan-laut-china-selatan-dinilai-jadi-tantangan-keketuaan-asean-indonesia/">https://www.harianaceh.co.id/2023/02/08/isu-myanmar-dan-laut-china-selatan-dinilai-jadi-tantangan-keketuaan-asean-indonesia/</a>
Jurnalis	Sumber dari Republika

Redaksi HAI

### **Isu Myanmar dan Laut China Selatan Dinilai Jadi Tantangan Keketuaan ASEAN Indonesia**

#### **Keterlibatan aktif Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satrio Soemantri Brodjonegoro mengatakan, terdapat beberapa isu regional yang menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini. Dua di antara isu tersebut terkait krisis Myanmar dan persengketaan Laut Cina Selatan.

Satrio menjelaskan, mengatasi instabilitas politik di Myanmar membutuhkan pendekatan komprehensif yang turut mempertimbangkan aspek historis dan berbagai konflik berbasis etnis di negara tersebut. Menurutnya, kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada Februari 2021 memperparah keadaan di sana. Aksi perebutan kekuasaan itu pun merepresentasikan kemunduran dari upaya negosiasi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki peran sangat penting dalam menjamin komitmen di antara pihak-pihak terkait dalam krisis Myanmar untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus dan menunjuk utusan khusus untuk Myanmar yang baru,” kata Satrio saat membuka seminar bertajuk “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” yang digelar AIPI bersama The Habibie Center (THC), Rabu (8/2/2023).

Kemudian terkait persengketaan di Laut China Selatan, Satrio mengatakan, Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, harus memastikan keberlanjutan negosiasi tentang kode tata perilaku atau Code of Conduct (CoC). “Selain diperlukan komitmen dari para pihak, Indonesia perlu menekankan pentingnya implementasi sentralitas ASEAN secara lebih efektif yang akan berpengaruh besar dalam kemajuan penyusunan CoC,” ujarnya.

## MEDIA COVERAGE

Satryo berpendapat, keterlibatan aktif Indonesia juga akan disorot dalam merespons isu-isu geopolitik, terutama dalam merespons dinamika dan rivalitas AS dan Cina serta peran ASEAN di Indo-Pasifik. “Termasuk sensitivitas ASEAN terhadap potensi hadirnya kompetisi antar-negara adidaya di Asia Tenggara,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia perlu menjelaskan karakter inklusif dan konstruksi Indo-Pasifik yang diteruskan oleh ASEAN melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Terkait [isu Myanmar](#) yang disinggung Satryo, sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus yang diusulkan Indonesia untuk menangani situasi di Myanmar memperoleh dukungan dari semua anggota ASEAN. Retno menilai, hal itu menunjukkan persatuan ASEAN.

Retno mengungkapkan, ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus menjadi salah satu topik yang dibahas dalam ASEAN Foreign Ministers (AFM) Retreat yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu (4/2/2023). “Seperti yang dimandatkan para pemimpin, sebagai ketua (ASEAN 2023), Indonesia telah mengusulkan dan isu itu telah didiskusikan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus. Dukungan luas diterima dari semua anggota (ASEAN) untuk rencana ini,” kata Retno saat memberi keterangan pers sesuai AFM Retreat.

Dia mengungkapkan, rencana implementasi Lima Poin Konsensus sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai panduan untuk menangani situasi di Myanmar secara kompak. “(Rencana implementasi) ini memperlihatkan persatuan kuat anggota ASEAN untuk menerapkan Lima Poin Konsensus,” ujar Retno.

Retno mengungkapkan, CoC juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam AFM Retreat. “Komitmen para negara anggota (ASEAN) untuk menyelesaikan negosiasi CoC sesegera mungkin, jelas,” ujar Retno.

Dia menyebut ada kebutuhan untuk menyepakati CoC yang substantif, efektif, dan dapat diterapkan. “Indonesia siap menyelenggarakan lebih banyak putaran negosiasi CoC tahun ini. Yang pertama akan digelar pada Maret,” ujar Retno.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro mengatakan, niat ketua dan anggota ASEAN tahun ini adalah mengintensifkan negosiasi CoC. “Eksplorasi pendekatan baru akan dilakukan,” ucapnya sesuai Retno menyampaikan keterangan persnya.

Sidharto mengatakan, seperti dalam semua negosiasi, perundingan terkait CoC adalah proses. “Proses itu sendiri mungkin terpenting hasilnya. Jadi proses juga adalah kunci. Dan ini adalah sesuatu yang kami niatkan untuk intensifkan,” ujarnya.

## MEDIA COVERAGE

Dia menjelaskan masalah **Laut Cina Selatan** sudah berlangsung lama. Masalah itu telah eksis sebelum adanya Declaration of Conduct (DoC) dan CoC. “Di antara unsur yang ada di DoC (adalah) semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang bisa mengubah situasi di kawasan (Laut Cina Selatan). Indonesia sendiri, kita tidak menerima segala bentuk upaya yang mengubah situasi di laut,” kata Sidharto.

Untuk menangani perselisihan klaim di Laut China Selatan, ASEAN dan China menandatangani DoC di Kamboja pada November 2002. Deklarasi itu memuat komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.

Kemudian pada 2011 China dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guideline for the Implementation of the DOC. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan CoC atau kode etik di Laut China Selatan. Fungsinya adalah menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Dengan demikian, potensi pecahnya konflik akibat tumpang tindih klaim dapat diredam.

Cina diketahui mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai teritorialnya. Klaim itu ditentang sejumlah negara ASEAN yang wilayahnya turut mencakup perairan tersebut, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Wilayah Laut Natuna Utara Indonesia juga bersinggungan langsung dengan klaim China di Laut Cina Selatan.